

ABSTRAK

Dzikri Mahardika, 1228010060, 2026, Efektivitas Komunikasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPRD Provinsi Jawa Barat Dalam Menyampaikan Informasi Publik Melalui Media Digital.

Keterbukaan informasi publik merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Meskipun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah menyediakan kanal layanan informasi publik berbasis digital, hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 menunjukkan lembaga ini berada pada kualifikasi "Tidak Informatif" dengan nilai 25,2. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara komitmen normatif dengan efektivitas penyampaian informasi di ruang digital, yang diperkuat dengan temuan awal mengenai lambatnya pemutakhiran data (*updating gap*) pada menu laporan PPID di situs resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas komunikasi publik PPID DPRD Provinsi Jawa Barat melalui media digital.

Untuk membedah fenomena tersebut secara komprehensif, penelitian ini mengombinasikan dua landasan teoretis utama, yaitu konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dari Agus Dwiyanto untuk mengukur aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas tata kelola, dan responsivitas internal, serta teori efektivitas komunikasi publik dari Hafied Cangara yang berfokus pada kualitas penyampaian pesan melalui dimensi kejelasan (*clarity*), kelengkapan (*completeness*), kredibilitas (*credibility*), dan daya tarik (*appeal*). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan empat orang informan yang terdiri dari informan kunci dan pelaksana teknis, observasi langsung pada situs web resmi dan media sosial Instagram @dprd_jabar, serta studi dokumentasi. Teknik analisis data diaplikasikan menggunakan model spiral kualitatif dari John W. Creswell.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi publik PPID DPRD Provinsi Jawa Barat sudah berjalan sangat efektif pada dimensi kredibilitas (*credibility*) melalui jaminan keabsahan dokumen menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan daya tarik (*appeal*) melalui transformasi bahasa birokrasi ke dalam bentuk infografis populer di media sosial. Namun, efektivitas komunikasi secara keseluruhan masih terhambat pada aspek responsivitas (*responsiveness*) dan kelengkapan (*completeness*). Hal ini disebabkan oleh pola koordinasi pemenuhan data antar-unit kerja (*back-office*) yang masih bersifat manual sehingga memicu terjadinya *updating gap*. Penelitian ini merekomendasikan perlunya akselerasi integrasi sistem basis data terpadu dan penyusunan SOP layanan informasi digital yang adaptif guna meningkatkan performa keterbukaan informasi lembaga menuju kualifikasi "Informatif".

Kata Kunci: Efektivitas Komunikasi Publik, PPID, *Good Governance*, Media Digital.

